



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DEKRISON
NIK : 6211040712780001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Unit Kerja : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Kerja : BIDANG PERKEBUNAN
Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN PRODUKSI
Jenis Laporan : Periodik - 2021
Tanggal Kirim : 10 Maret 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2022-05-19 14:00:30



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEKRISON
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN PRODUKSI
3. NHK : 741369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/48 m2 di MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.800.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.260.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	---
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	359.060.000
III. HUTANG	Rp.	1.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	357.260.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.